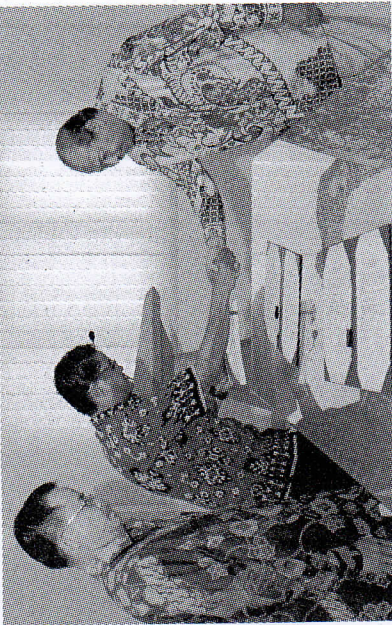




Laporan Keuangan Pemkab Melawi WDP



Pucuk pimpinan Melawi saat menerima hasil akhir pemeriksaan keuangan Pemkab Melawi. SURAWATI

"Selama kita berkeinginan kearah sana (mendapat opini WTP), tentunya ini harus sama-sama bekerja keras. Perlu ada sinergisitas antar instansi di jajaran Pemkab Melawi. Agar Daerah (LKPD) tahun 2012, dimintanya opini WTP pada tahun mendatang bisa kita dapatkan," katanya.

Disisi lain, tambah Panji, LKPD Melawi tetap masih memiliki kekurangan. Sehingga masih ada beberapa temuan yang menjadi catatan BPK sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Catatan tersebut, kata dia, bukan muncul karena adanya sejumlah kesalahan yang disengaja. Tapi dikarenakan ketidakpahaman pegawai, sehingga perlu diperbaiki atau kalau perlu dikembalikan ke kas daerah.

"Kekurangan dan kelemahan pasti ada. Tapi kan sebenarnya temuan, karena persoalan administrasi. Niat untuk bikin salah itu tentu tidak ada. Hanya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan daerah," ucapnya.

Yang terpenting, kata Panji, seluruh bagian dari Pemkab Melawi harus terus melakukan evaluasi

an, Pemkab Melawi lebih teliti menata aset dan mengelola keuangan yang lebih baik. Pasalnya jika tidak, maka status disclaimer yang disandang selama beberapa tahun tersebut akan kembali didapat.

Dalam press rilis BPK RI, ditengarai, BPK melihat Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Kabupaten Melawi telah melakukan upaya-upaya perbaikan selama tahun 2012. Kabupaten Melawi yang memperoleh opini Tidak Wajar pada tahun sebelumnya, pada tahun 2012 telah melakukan upaya perbaikan yakni penerbitan SKTJM pada Bendahara Pengecualian yang belum menyertakan sisa UYHD.

Selain itu Pemkab Melawi berupaya melakukan inventarisasi atas persediaan pada akhir periode, pengungkapan atas investasi permanen pada PDAM sesuai dengan metode ekuitas, dan perintah pada SKPD dan DPPKAD untuk melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap. Usaha tersebut membuahakan hasil peningkatan opini menjadi WDP terhadap LKPD Kabupaten Melawi TA 2012. (ajj)

berikan apresiasi terhadap keberhasilan Melawi meraih opini WDP. Ia mengatakan, prestasi ini patut diacungi jempol. Apalagi beberapa tahun terakhir, Melawi hanya menyandang opini disclaimer dan Tidak Wajar dari BPK. "Naiknya status harusnya menjadi pemacu kita untuk terus bekerja, minimal mempertahankannya dan kalau bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.

Politis Golkar ini menyarakannya. Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, mem-

terhadap penyusunan dan perencanaan LKPD. Sehingga opini WTP benar-benar bisa tercapai. "Jangan bosan-bosan melakukan evaluasi. Agar kita bisa mendapatkan WTP pada tahun mendatang. Saya pun mengucapkan terima kasih pada pegawai serta masyarakat yang sudah mendukung pemerintahan kita naik pada tahun ini," pesannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, mem-

NANGA PINOH, Melawi berbenah yang diusung pucuk pimpinan Pemkab Melawi benar-benar terwujud. Hal itu tergambar melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012, dimintai BPK dengan Wajar. Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

"WDP terhadap keuangan daerah Melawi merupakan yang pertama kalinya. Pada tahun sebelumnya mendapatkan opini Tidak Wajar dari BPK. Jadi patut kita syukuri, berarti ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama ada niat dan kerja keras, tentunya laporan keuangan daerah akan tahun sebelumnya," kata Wakil Bupati Melawi, Panji SSos, ditemui wartawan baru-baru ini.

Panji bersama Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, menerima langsung hasil pemeriksaan LKPD Melawi di gedung BPK RI Perwakilan Kalbar di Pontianak. Menurutnya, sesuai dengan arahan kepala perwakilan BPK RI, Adi Sudbyo yang meminta agar prestasi itu bisa dipertahankan, bahkan meningkat ke arah yang lebih baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).